

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021

JL. DIPONEGORO - MAUMERE

SIKKA – NUSA TENGGARA TIMUR 86615

Telp. (0382)21134 Fax. (0382) 23514

e-mail : pa.maumere@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. DIPONEGORO - MAUMERE

Telp. (0382) 21134 Fax. (0382) 23514

SIKKA - Nusa Tenggara Timur 86615

e-mail : pa.maumere@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Maumere adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere mengacupada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Maumere. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Maumere, 30 Juni 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



RURI ENDO, S.H
NIP. 19710421 199603 1 002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	25
A. Penjelasan Umum	25
A.1. Dasar Hukum.....	25
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Maumere	26
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	27
A.4. Basis Akuntansi	27
A.5. Dasar Pengukuran	28
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	28
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	50
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	50
B.2. Belanja.....	51
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	56
C.1. Aset Lancar.....	56
C.2. Aset Tetap	58
C.3. Aset Lainnya	63
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	66
C.6. Ekuitas	67

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	67
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	67
D.2.	Beban Pegawai	68
D.3.	Beban Persediaan	69
D.4.	Beban Barang dan Jasa	69
D.5.	Beban Pemeliharaan	70
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	71
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	71
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	72
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	72
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	73
D.11.	Beban Lain-lain.....	74
D.12.	Kegiatan Non Operasional	74
D.13.	Pos Luar Biasa	75
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	75
E.1.	Ekuitas Awal	75
E.2.	Surplus (defisit) LO	75
E.3.	1. Penyesuaian Nilai Aset	76
E.3.	2 Koreksi Nilai Persediaan	76
E.3.	3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	76
E.3.	4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	76
E.3.	5 Koreksi Lain-lain	77
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	77
E.4.	1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	78
E.4.	2 Transfer Masuk/Transfer Keluar	78
E.3.	Ekuitas Akhir.....	79
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	79
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	79
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	79

Daftar dan Lampiran	81
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	82
Daftar Hibah Langsung.....	85

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

**Pengadilan
Agama
MAUMERE**

Jl.Diponegoro No -,
Maumere SIKKA - Nusa

Tenggara Timur 86115

Telp. 0382-21134 Fax. 0382-23514 e-mail : pa.maumere@gmail.com

RINGKASAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Maumere, 30 Juni 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



JUFRI ENDO, S.HI

NIP.19710421 199603 1 002

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 30 Juni 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 563,069 atau mencapai 14 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.4,046,270.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2,238,148,706 atau mencapai 99.73 persen dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp 2,244,318,000 (Pagu awal sebesar Rp.2,216,063,000)

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2021.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 8,724,540,267, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 724,300; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 8,719,869,717; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 3,946,250.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp 8,724,540,267.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.563,069, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 2,573,625,645 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.2,573,062,576) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(defisit) sebesar Rp.677,600 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp. 2,572,384,976).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 9,065,911,606 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 2,572,384,976) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. (6,572,000) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2,237,585,637 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp. 8,724,540,267.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan

Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA MAUMERE LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2021 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	30 Juni 2018			2016
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	563,069	0	4,537,586
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah			0	563,069	0	4,537,586
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	1,447,329,000	1,441,654,706	99,70	1,744,701,850
2.	Belanja Barang	B.2.2.	644,489,000	644,484,000	100	573,704,000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	152,500,000	152,010,000	99,68	106,000,000
Jumlah Belanja Negara			2,244,318,000	2,238,148,706	99,73	2,424,405,850

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

NERACA

PER 30 Juni 2021

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2016
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	724,300	3,035,000
Persediaan yang Belum Diregister	C.1. 4.	0	0
Jumlah Aset Lancar		724,300	3,035,000
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	907,216,000	907,216,000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2,412,732,756	2.172.173.699
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	8,496,345,641	8,496,345,641
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	25,044,770	25,044,770
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(3,121,469,450)	(2,630,962,561)
Jumlah Aset Tetap		8,719,869,717	9,062,876,606
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	4,510,000	0
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	20,822,000	20,822,000
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.4. 3.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 4.	(21,385,750)	(20,822,000)
Jumlah Aset Lainnya		3,946,250	0
Jumlah Aset		8,724,540,267	9,065,911,606
KEWAJIBAN			

Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		8,724,540,267	9,065,911,606
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		8,724,540,267	9,065,911,606

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2017	2016
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	563,069	4,537,586
Jumlah Pendapatan		563,069	4,537,586
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	1,441,654,706	1,745,505,100
Beban Persediaan	D. 3	60,219,000	23,914,154
Beban Barang dan Jasa	D. 4	271,093,300	258,615,000
Beban Pemeliharaan	D. 5	196,308,000	145,210,472
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	113,280,000	144,080,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	491,070,639	507,404,801
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		2,573,625,645	2,824,729,527
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional			
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		677,600	859,626
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1,113,400	1,074,102

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	435,800	214,476
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	677,600	859,626
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(2,572,384,976)	(2,819,332,315)
Pos Luar Biasa	D. 13	0
Pendapatan PNB	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(2,572,384,976)	(2,819,332,315)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2017	2016
Ekuitas Awal	E. 1	9,065,911,606	9,678,919,365
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(2,572,384,976)	(2,819,332,315)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		(6,572,000)	(214,113,608)
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	(214,113,608)
Koreksi Lain-lain	E. 7	(6,572,000)	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	2,237,585,637	2,420,438,164
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	E. 9	(341,371,339)	(613,007,759)
Ekuitas Akhir		8,724,540,267	9,065,911,606

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Maumere

Visi Pengadilan Agama Maumere adalah

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Maumere

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Maumere.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Prima dan Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Profesionalitas dan Kredibilitas Aparatur Pengadilan Agama Maumere.
4. Meningkatkan Pengawasan dan Transpaaransi di Pengadilan Agama Maumere.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Maumere melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Maumere.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
3. Meningkatkan mutu pelayanan.
4. Meningkatnya kemampuan aparat peradilan yang akuntabel.
5. Meningkatkan mutu pengelolaan administrasi perkara.
6. Melaksanakan penerimaan dan penyelesaian perkara.
7. Meningkatkan sumberdaya aparatur peradilan.
8. Meningkatkan pengetahuan tentang penerapan administrasi persuratan, kearsipan dan keprotokolan, humas dan keamanan.
9. Meningkatnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan

pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp
563,069*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 563,069 atau mencapai 14 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 4,046,270. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	562,939	0,00
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	4,046,270	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	130	0,00
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0,00
Total Pendapatan		4,046,270	563,069	0,00

Adanya pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 563,069 dikarenakan gedung Kantor Lama Pengadilan Agama Maumere kini difungsikan sebagai mess pegawai, sehingga terhitung mulai Juni 2017 terdapat PNBP dari sewa tanah, gedung dan bangunan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 563,069 atau mencapai 14 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 4,046,270.

Perbandingan realisasi PNBP 30 Juni 2018 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2018 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2018	2016	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	562,939	519,636	43,303	7,69
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	00,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	4,017,950	(4,017,950)	(100)
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	130	0	130	100
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0	00,00
Total Pendapatan		563,069	4,537,586	(3,974,517)	(705,86)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara : Rp
2,238,148,706

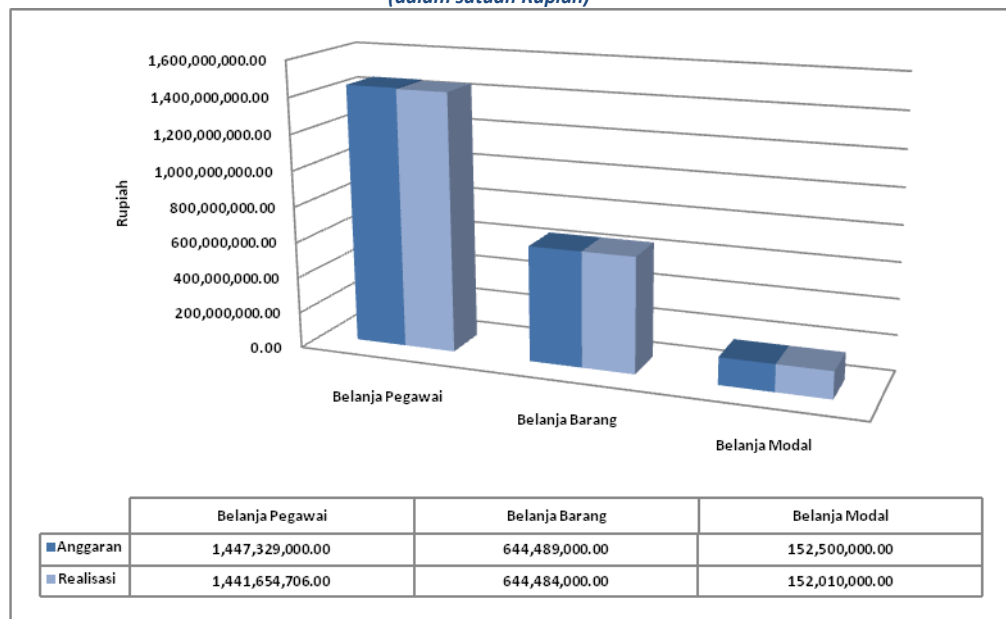
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 2,238,148,706 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,73% dari anggaran senilai Rp. 2,244,318,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 Juni 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1,447,329,000	1,441,654,706	99,70
Belanja Barang	644,489,000	644,484,000	100
Belanja Modal	152,500,000	152,010,000	99,68
Total Belanja Bruto	2,244,318,000	2,238,148,706	99,73
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	2,244,318,000	2,238,148,706	99,73

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2018
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2017& 2016

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 2,238,148,706 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,73% dari anggaran senilai Rp. 2,244,318,000. Perbandingan realisasi belanja 30 Juni 2018 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	2016	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1,441,654,706	1,744,701,850	(303,047,144)	(21,02)
Belanja Barang	644,484,000	573,704,000	70,780,000	10,98
Belanja Modal	152,010,000	106,000,000	46,010,000	30,26
Total Belanja	2,238,148,706	2,424,405,850	(186,257,144)	(8,32)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
1,441,654,70
6

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 1,441,654,706 dan Rp. 1,744,701,850.

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2021 dan 2016 adalah sebesar Rp. Rp. 1,441,654,706 dan Rp. 1,744,701,850. Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar (21,02) persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai 2016. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Mutasi pegawai mutasi keluar dari Pengadilan Agama Maumere, sehingga jumlah pegawai pada Tahun 2021 berkurang.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2021 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	537,697,600	635,143,480	(97,445,880)	(15.34)
Beban Pembulatan Gaji PNS	8,206	8,180	26	0.31
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	33,025,590	41,038,228	(8,012,638)	(19.52)
Beban Tunj. Anak PNS	11,278,642	14,198,294	(2,919,652)	(20.56)
Beban Tunj. Struktural PNS	24,170,000	26,130,000	(1,960,000)	(7.50)
Beban Tunj. Fungsional PNS	599,770,000	720,335,000	(120,565,000)	(16.73)
Beban Tunj. PPh PNS	70,851,698	107,350,418	(36,498,720)	(33.99)
Beban Tunj. Beras PNS	29,112,840	34,399,500	(5,286,660)	(15.36)
Beban Uang Makan PNS	85,790,000	96,882,000	(11,092,000)	(11.44)
Beban Tunjangan Umum PNS	0	180,000	180,000	100
Beban Tunjangan Kemahalan	49,950,000	64,800,000	(14,850,000)	(22.91)
Hakim				
Total Belanja Brutto	1,441,654,706	1,744,701,850	(303,047,144)	(21,02)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1,441,654,706	1,744,701,850	(303,047,144)	(21,02)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp
644,484,000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2021 dan 2016 adalah sebesar Rp. 644,484,000 dan Rp. 573,704,000.

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2021 dan 2016 adalah

sebesar Rp. 644,484,000 dan Rp. 573,704,000. Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,98 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Belanja Barang Operasional
2. Kenaikan Belanja Barang Non Operasional
3. Kenaikan Belanja Jasa
4. Kenaikan Belanja Pemeliharaan
5. Kenaikan Belanja Perjalanan Dinas

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2021 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	2016	Perubahan (Naik/ Turun)	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	243,621,500	191,277,154	52,344,346	21,48
Belanja Barang Non Operasional	20,800,000	23,153,000	(2,353,000)	(10,16)
Belanja Jasa	66,890,800	68,099,000	(1,208,200)	(1,80)
Belanja Pemeliharaan	196,308,000	145,210,472	51,097,528	26,02
Belanja Perjalanan Dinas	113,280,000	144,080,000	(30,800,000)	(21,377)
Total Belanja Brutto	644,484,000	573,704,000	70,780,000	10,98
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	644,484,000	573,704,000	70,780,000	10,98

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal :Rp
152.010.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2021 dan 2016 adalah sebesar Rp. 152,010,000 dan Rp. 106,000,000.

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2021 dan 2016 adalah sebesar Rp. 152,010,000 dan Rp. 106,000,000. Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2021

mengalami kenaikan sebesar (30,26) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penambahan barang belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun 2021 yang tidak ada pada tahun 2016.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2021 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	2016	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	152,010,000	106,000,000	46.010.000	30,26
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	
Total Belanja Brutto	152,010,000	106,000,000	46.010.000	30,26
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	152,010,000	106,000,000	46.010.000	30,26

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
724,300

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 724,300 dan Rp. 3,035,000.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2021 dan 2016 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2021	TA 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0
Persediaan	724,300	3,035,00
Persediaan yang belum diregister	0	0
Total Aset Lancar	724,300	3,035,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2018	TA 2016
Jumlah		0	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp 0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka (dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2018	TA 2016
Jumlah		0	0

belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca. Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

C.1.3. Persediaan

*Persediaan: Rp
724,300*

Persediaan per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 724,300 dan Rp. 3,035,000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan TA 2016 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni 2018 dan TA 2016

No.	Uraian	30 Juni 2018	TA 2016
1	Barang Konsumsi	724,300	3,035,00
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		724,300	3,035,00

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
8,719,869,717*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan TA 2016 tersaji sebesar Rp. 8,719,869,717 dan Rp. 9,062,876,606. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan TA 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2018	TA 2016	Perubahan
1	Tanah	907,216,000	907,216,000	0
2	Peralatan dan Mesin	2,412,732,756	2,265,232,756	147,500,000
3	Gedung dan Bangunan	8,496,345,641	8,496,345,641	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	25,044,770	25,044,770	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0

Jumlah	11,841,339,167	11,693,839,167	147,500,00
Akumulasi Penyusutan	(3,121,469,450)	(2,630,962,561)	(490,506,889)
Nilai Buku Aset Tetap	8,719,869,717	9,062,876,606	(343,006,889)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp 907,216,000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2018 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 907,216,000 dan Rp. 907,216,000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No	KIB	Luas (m ²)	No.	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
Sertifikat						
1	1	750	Hak Pakai Nomor 30	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung		24,216,000
2	3	3.840	Hak Pakai Nomor 18	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung		62,000,000
3	4	272	Hak Pakai Nomor 29	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung		821,000,000
Jumlah						907,216,000

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2018 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 907,216,000 dan Rp. 907,216,000. Jadi nilai aset tanah per 30 Juni 2021 adalah Rp. 907,216,000.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 2,412,732,756

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2018 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 2,412,732,756 dan Rp. 2,265,232,756.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per TA 2016	2,265,232,756
Mutasi Tambah	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152,010,000
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	2,412,732,756
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	(1,992,253,360)
Nilai Buku 30 Juni 2018	428,931,896

Nilai perolehan asset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 2,412,732,756 dan Rp. 2,265,232,756 karena adanya penambahan peralatan dan mesin. Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada semester I Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 152,010,000,-. Sedangkan perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian adalah sebesar Rp. 152,010,000,-. Selisih realisasi belanja modal dengan hasil perolehan aset dari pembelian merupakan kapitalisasi aset yang perolehannya bersumber dari belanja barang namun memenuhi kriteria sebagai Peralatan dan Mesin. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan : Rp
8,496,345,641*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 8,496,345,641 dan Rp. 8,496,345,641.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per TA 2016	8,496,345,641
Mutasi Tambah	

Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	8,496,345,641
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	(1,137,297,340)
Nilai Buku 30 Juni 2018	7,359,048,301

Nilai perolehan aset Tetap berupa gedung dan bangunan per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 8,496,345,641 dan Rp. 8,496,345,641.

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 8,496,345,641 dan Rp. 8,496,345,641.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan :
Rp 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per TA 2016
Mutasi Tambah
Mutasi Kurang
Saldo per 30 Juni 2018
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018
Nilai Buku 30 Juni 2018

Nilai perolehan aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. Rp. 0. Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. Rp. 0. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 25,044,770

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 25,044,770 dan Rp. 25,044,770.

aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 25,044,770 dan Rp. 25,044,770.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per TA 2016	25,044,770
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	25,044,770
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	25,044,770
Nilai Buku 30 Juni 2018	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan Aset tetap :
Rp (3,121,469,450)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing Rp (3,121,469,450) dan Rp. (2,630,962,561).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2,412,732,756	(1,992,253,360)	428,931,896
2	Gedung dan Bangunan	8,496,345,641	(1,137,297,340)	7,359,048,301
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	25,044,770	(25,044,770)	0
	Jumlah	11,841,339,167	(3,121,469,450)	8,719,869,717

*Aset Lainnya:
Rp 3,946,250*

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 3,946,250 dan Rp. 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2018	TA 2016
1	Aset tak Berwujud	4,510,000	0
2	Aset Lain-lain	20,822,000	20,822,000
3	Aset Lainnya yang belum egister	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	25,332,000	20,822,000
	Akumulasi Penyusutan Aset nnya	(20,822,000)	(20,822,000)
	Nilai buku Aset Lainnya	3,946,250	0

C.4.1. Aset tak berwujud

*Aset tak Berwujud :
Rp 4,510,000*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,510,000 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
	Jumlah Total	4,510,000

saldo aset tak berwujud per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing sebesar

Rp. 4,510,000 dan Rp. 0. aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2018 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Silahkan tambahkan penjelasan, contoh : Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Maumere berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama Tahun 2018.

C.4.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp 20,822,000*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 20,822,000 dan Rp. 20,822,000. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama MAUMERE serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 30 Juni 2016	20,822,000
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	20,822,000

saldo aset lain-lain per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 20,822,000 dan Rp. 20,822,000. aset lain-lain merupakan barang milik Negara yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional. Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2018 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 20,822,000 dan Rp. 20,822,000. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama MAUMERE serta dalam proses penghapusan dari BMN

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp 0*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	TA 2016
Jumlah	0	0

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp0*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama MAUMERE per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
Jumlah		0	0

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh

Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp
8,724,540,267*

Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 8,724,540,267 dan Rp 9,065,911,606. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2018 terdapat penurunan nilai Kewajiban sebesar Rp. 341,371,339 (3,77%) dari nilai per TA 2021. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 8,724,540,267, sedangkan per TA 2021 tercatat sebesar Rp. 9,065,911,606.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp
563,069*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah sebesar Rp 563,069 dan Rp 4,537,586. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2018 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	562,939	519,636	43,303
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	4,017,950	(4,017,950)
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	130	0	130

Lalu			
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0
		0	0
Total Pendapatan		563,069	4,537,586
			(3,974,517)

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp
1,441,654,706

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 1,441,654,706 dan Rp. 1,744,701,850. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Uraian	30 Juni 2018	2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	537,697,600	635,143,480	(97,445,880)	(15.34)
Beban Pembulatan Gaji PNS	8,206	8,180	26	0.31
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	33,025,590	41,038,228	(8,012,638)	(19.52)
Beban Tunj. Anak PNS	11,278,642	14,198,294	(2,919,652)	(20.56)
Beban Tunj. Struktural PNS	24,170,000	26,130,000	(1,960,000)	(7.50)
Beban Tunj. Fungsional PNS	599,770,000	720,335,000	(120,565,000)	(16.73)
Beban Tunj. PPh PNS	70,851,698	107,350,418	(36,498,720)	(33.99)
Beban Tunj. Beras PNS	29,112,840	34,399,500	(5,286,660)	(15.36)

Beban Uang Makan PNS	85,790,000	96,882,000	(11,092,000)	(11.44)
Beban Tunjangan Umum PNS	0	180,000	180,000	100
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	49,950,000	64,800,000	(14,850,000)	(22.91)
Jumlah Beban Pegawai	1,441,654,706	1,744,701,850	(303,047,144)	(21,02)

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2021 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan :
Rp60,219,000*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 60,219,000 dan Rp. 23,914,154. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2021 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	60,219,000	22,139,950	38,079,050	171.99
Beban Persediaan Pita Cukai, Materei dan Leges	0	1,140,000	(1,140,000)	(100)
Beban Persediaan Bahan Baku	0	634,204	(634,204)	(100)
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	60,219,000	23,914,154	36,304,846	60,28

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp
271,093,300*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.271,093,300 dan Rp. 258,615,000. Beban

Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2021 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	125,880,000	25,639,000	241,000	0.19
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2,279,000	3,600,000	(1,321,000)	(36.69)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,511,500	2,784,000	727,500	6.13
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	42,840,000	33,240,000	9,600,000	28.88
Beban Operasional Lainnya	8,892,000	2,100,000	6,792,000	323.42
Beban Bahan	20,800,000	23,153,000	(2,353,000)	(10.16)
Beban Langganan Listrik	52,924,200	47,222,000	5,705,200	(12.07)
Beban Langganan Telepon	13,966,600	20,877,000	(6,910,400)	(33.10)
Total Beban Barang dan Jasa	271,093,300	258,615,000	12,478,300	4.60

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp196,308,000*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 196,308,000 dan Rp.145,210,472. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2021 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,320,000	60,000,000	39,320,000	65.53
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87,078,000	75,206,000	11,872,000	15.78

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,640,000	7,065,000	(2,425,000)	(34.32)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	5,270,000	2,939,472	2,330,528	79.28
Total Beban Pemeliharaan	196,308,000	145,210,472	51,097,528	26.02

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp113,280,000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 113,280,000 dan Rp. 144,080,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2021 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	113,280,000	144,080,000	(30,800,000)	21.37
Total Beban Perjalanan Dinas	113,280,000	144,080,000	(30,800,000)	21.37

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat : Rp
0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni 2021 dan TA 2016**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	TA 2016	Naik(Turun)	%
--------	--------------	---------	-------------	---

Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni 2021 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 Juni 2018	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi :

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 491,070,639 dan

Rp491,070,639

Rp. 507,404,801. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2021 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan	316,283,535	329,170,869	(12,887,334)	(3.91)
Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan	174,223,354	178,233,932	(4,010,578)	(2.25)
Gedung dan Bangunan				
Jumlah Penyusutan				
Beban Amortisasi	563,750	0	563,750	0
Software				
Beban Penyusutan Aset	0	0	0	0
lain-lain				
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	491,070,639	507,404,801	(16,334,162)	(3.33)

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni 2021 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang	0	0	0	0

tak Tertagih – Piutang				
Jangka Panjang				
Total Beban Penyisihan	0	0	0	0
Piutang tak Tertagih				

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain
: Rp 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni 2018 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Aset	0	0	0	0
Extrakomptabel Peralatan dan Mesin				
Beban Aset	0	0	0	0
Extrakomptabel Gedung dan Bangunan				
Beban Aset	0	0	0	0
Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional
: Rp 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2021 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	TA 2016	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset	0	0	0	0
Non Lancar				
Penjualan Alat	0	0	0	0
Angkut Darat				
Defisit Penjualan Aset	0	0	0	0
Non Lancar				
Penjualan Alat				
Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni 2018 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.9,065,911,606 dan Rp. 9,678,919,365.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah sebesar Rp. (2,572,384,976) dan Rp. (2,819,332,315). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional,

surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan	0
Lainnya	
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni

2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. (214,113,608). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. (6,572,000) dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni 2021**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	6,572,000
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	6,572,000

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,237,585,637 dan Rp. 2,420,438,164.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni 2021**
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
-------------------------	-------

Diterima dari Entitas Lain	(562,939)
Ditagikan ke Entitas Lain	2,238,148,576
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	2,237,585,637

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2021, DDEL sebesar Rp. (562,939) sedangkan DKEL sebesar Rp. 2,238,148,576.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, sebesar Rp. 0,- dari total Rp. 0,- yang diterima sepanjang Tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, adalah Rp. 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2018 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp8,724,540,267 dan Rp9,065,911,606.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak kejadian – kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut dari temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak ada pendapatan dan belanja secara akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama MAUMERE adalah

1. BPG 040 Pengadilan Agama Maumere. 01 nomor rekening 0119-01-000279-30-1 (BRI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung DIPA BUA dengan izin pembukaan rekening nomor KPPN No. S-659/WPB.23/KP.0430/2015 tgl 16/06/2015.
2. BPG 040 Pengadilan Agama Maumere 04 no rekening 0273509946 (BNI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung DIPA BADILAG dengan izin pembukaan rekening nomor KPPN No. S-659/WPB.23/KP.0430/2015 tgl 16/06/2015.
3. RPL 040 PA MAUMERE UNTUK PDT BIAYA PERKARA Nomor Rekening 0162741943 (BNI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung Biaya perkara / Titipan pihak ke 3 dengan izin pembukaan rekening nomor Menteri Keuangan No. S-6659/MK.5/2015 tgl 10/08/2015.

F.2.4. Revisi DIPA

Dilakukan 2 (dua) kali revisi DIPA yaitu revisi pertama tertanggal 16 November 2017 dengan nomor DS:6758-2460-0294-2307 dan revisi kedua tertanggal 29 Desember 2017 dengan nomor DS:6758-2460-0294-2307 selama Tahun Anggaran 2021.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Dilakukan ralat SPM sebanyak 2 spm dengan nomor SPM (tanggal) 00102 (13 Desember 2017) dan 00103 (13 Desember 2017) hal ini dilakukan karena adanya kesalahan dalam kode akun potongan.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Kuasa Pengguna Anggaran : Rakimin Syarif, S.Ag

Pejabat Pembuat Komitmen : Fahmi Said Hakim, S.H, M.H

Pejabat Penandatanganan/penguji SPM : Bagus Adi Prabowo, S.H

Bendahara : Hamzah Usman

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama MAUMERE

**Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021**

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan sd Periode Ini	Beban Penyusutan	Total Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
					2017	Per 30 Juni 2018	Per 30 Juni 2017
A.	Peralatan dan Mesin	20	2.320.737.874	1.565.124.329	234,337,280	1,801,036,609	519,701,265
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	5	224.372.028	212.881.433	11.490.595	224.372.028	0
2.	Alat Kantor	2	256.960.162	135.216.562	35,729,871	171,741,433	85,218,729
3.	Alat Rumah Tangga	2	724.446.637	328.317.339	119,517,526	448,659,865	275,786,772
4.	Alat Studio	3	33.844.005	8.550.904	6,018,701	14,569,605	19,274,400
5.	Alat Komunikasi	3	11.794.201	5.544.681	1,867,020	7,411,701	4,382,500
6.	Peralatan Pemancar	2	6.279.417	4.525.736	627,942	5,153,678	1,125,739
7.	Komputer Unit	5	815.857.388	691.176.388	36,090,125	727,266,513	88,590,875
8.	Peralatan Komputer	3	247.154.036	178.836.286	22,995,500	201,831,786	45,322,250
9.	Komputer Olah Raga	2	30.000	30.000	0	30.000	0
B.	Gedung dan Bangunan	5	9.286.580.025	609.828.189	208,645,985	818,001,674	8,468,578,351
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3	7.229.951.025	216.908.056	144,621,901	361,057,457	6,868,893,568
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	1.232.044.000	307.460.980	47,414,514	354,875,494	877,168,506

3.	Tugu/tanda Batas	1	824.585.000	85.459.153	16,609,570	102,068,723	722,516,277
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1	207.000	83.111	13,041	96,152	110,848
1.	Jaringan Gardu Listrik	1	207.000	83.111	13,041	96,152	110,848
D.	Aset Tetap Lainnya	1	16.911.805	16.911.805	0	16.911.805	0
1.	Barang Bercorak Kesenian	1	16.911.805	16.911.805	0	16.911.805	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	10	9.871.000	9.871.000	0	9.871.000	0
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	1	600.000	600.000	0	600.000	0
2.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1	250.000	250.000	0	250.000	0
3.	Alat Kantor	2	141.000	141.000	0	141.000	0
4.	Alat Rumah Tangga	2	2.235.000	2.235.000	0	2.235.000	0
5.	Komputer Unit	1	5.995.000	5.995.000	0	5.995.000	0
6.	Peralatan Komputer	2	650.000	650.000	0	650.000	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		11.617.188.899	2.184.906.629	442,996,306	2,645,917,240	8,988,390,464
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		11.634.307.704	2.201.818.434	442,996,306	2,645,917,240	8,988,390,464

B. DAFTAR HIBAH LANGSUNG

Pengadilan Agama MAUMERE

Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
	Jumlah :						



Catatan atas Laporan Keuangan
005
01
2400
402820

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2021

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}